



PENGARUH ALOKASI ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN, PENDAPATAN PERKAPITA DAN PENDIDIKAN KEPALA RUMAH TANGGA TERHADAP ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh
Jolianis

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP- PGRI Sumbar
Jl. Gunung Pangilun No.1, Padang Sumatera Barat
email : jolianiskoto@ymail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze: 1) The effect of the education sector budget to the level of school participation, 2) Effect of per capita income to the level of school participation, 3) The effect of educational level of household heads to the level of school participation. This study is an exploration studies conducted on the entire government Kabupaten/Kota in the province of West Sumatra. Data analysis techniques used to prove and test the hypothesis raised is multiple linear regression. Results of the study found that: 1) There is a significant influence of the education sector budget to the level of school participation, 2) There is a significant effect of per capita income to the the level of school participation, 3) There is a significant influence on the level of education head of the family to the the level of school participation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Pengaruh anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah, 2) Pengaruh pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah, 3) Pengaruh tingkat pendidikan kepala rumah tangga terhadap angka partisipasi sekolah. Penelitian ini merupakan studi eksplorasi yang dilakukan pada seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data yang digunakan untuk membuktikan dan menguji hipotesis yang diajukan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa : 1) Terdapat pengaruh yang signifikan dari anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah, 2) Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah, 3) Terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi sekolah.

Keywords: The Level of School Participation, Education Sector Budget Allocation, Income Per capita and Education Head of Household

PENDAHULUAN

Sektor pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa/daerah, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara bertahap akan membentuk kemandirian. Individu yang demikian merupakan investasi besar dalam proses pembangunan di suatu negara, baik dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Desentralisasi pendidikan merupakan suatu kerangka kewenangan kebijakan pengelolaan pendidikan yang menggeser paradigma sentralisasi semasa pemerintahan orde baru. Konsep desentralisasi dan sentralisasi mengacu pada sejauh mana wewenang dilimpahkan, dari suatu tingkatan manajemen kepada tingkatan manajemen berikutnya yang berada dibawahnya, atau tetap ditahan pada tingkat puncak (sentralisasi).

Dengan demikian desentralisasi pendidikan mengacu pada pemberian kewenangan kebijakan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Tujuan diberlakukannya desentralisasi adalah terwujudnya pemerataan kesempatan pendidikan, adanya pengembangan keberagaman potensi peserta didik dan lingkungan dalam konteks kurikulum diversifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, serta sistem penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, desentralisasi merupakan program peningkatan tanggung jawab yang lebih besar untuk pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.

Konsekuensi diberlakukannya desentralisasi pendidikan di Provinsi Sumatera Barat adalah terjadinya peran pendidikan yang berkilat pada inovasi pemerintah daerah (termasuk kabupaten/kota) serta partisipasi

masyarakat. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dituntut kreasinya untuk mewujudkan kualitas pendidikan.

Di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, kesempatan memperoleh pendidikan masih belum merata terutama pada jenjang pendidikan menengah (SLTP dan SLTA). Dengan kata lain masih banyak penduduk yang termarginalkan oleh sistem pendidikan khususnya pendidikan Formal. Sisi lain yang dihadapi adalah belum kongruennya hasil pendidikan Formal. Pembangunan dibidang pendidikan masih banyak mengalami hambatan, yang membuat lulusannya kurang memadai dan banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Disini konsep desentralisasi pendidikan, terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam kenyataannya (termasuk di Provinsi Sumatera Barat), desentralisasi pendidikan merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah.

Dilihat dari sisi anggaran, sektor pendidikan merupakan sektor publik yang menjadi prioritas pada pembangunan, hal ini terlihat dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap sektor pendidikan.

Besarnya alokasi anggaran sektor pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut harusnya diiringi oleh peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) terutama pada tingkat pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Barat. Dimana tingkat (angka) partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator untuk melihat gambaran secara umum penduduk usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Menurut BPS dalam buku penyusunan indikator sosial (1994) dikatakan bahwa untuk menghitung partisipasi sekolah terdapat 3 metode yaitu angka partisipasi sekolah kasar (APK), angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi sekolah (APS). Dengan demikian pendidikan yang berkualitas dan murah sangat perlu diciptakan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah menyekolahkan anggota rumah tangganya masing-masing, sehingga diharapkan tingkat partisipasi sekolah daerah bersangkutan akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan..

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan diketahui bahwa secara umum di Kabupaten/Kota, rasio anggaran pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah adalah berkisar antara Rp. 714 176 sampai Rp. 6 228 072 per penduduk usia sekolah (tahun 2005-2008) tersebut belum memperlihatkan peningkatan tingkat partisipasi sekolah yang berarti.

Dari hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2005-2008 yang dilakukan BPS Provinsi Sumatera Barat, secara umum terlihat tingkat partisipasi sekolah (angka partisipasi sekolah) jenjang pendidikan menengah (SLTP dan SLTA) pada daerah kota lebih tinggi dari daerah kabupaten. Dan dari tahun 2005 sampai dengan 2008, Kota Padang hampir selalu yang tertinggi yaitu angka partisipasi sekolahnya hampir 90 persen, artinya dari total penduduk berusia 13-18 tahun di Kota Padang yang tidak bersekolah lagi/tidak

pernah sekolah hanya sekitar 10-12 persen. Begitu juga di Kota selain Padang di Provinsi Sumatera Barat, angka partisipasi sekolahnya tahun 2005-2008 rata-rata diatas 80 persen dan artinya kurang dari 20 persen yang tidak bersekolah pada usia 13-18 tahun. Begitu juga kalau hal ini dibandingkan dengan tingkat partisipasi sekolah rata-rata di tingkat provinsi. dilihat dari kelompok usia sekolah (13 – 15 dan 16 – 18 tahun) angka partisipasi sekolah daerah kota secara umum masih lebih baik dari daerah kabupaten. Kalau dibandingkan antara kelompok usia sekolah SLTP (13-15) dengan SLTA (16-18) terjadi fenomena yang menarik dari data kelompok usia sekolah ini yaitu adanya indikasi cukup besar terjadi penurunan angka partisipasi sekolah. Secara rata-rata di Provinsi Sumatera Barat, penduduk usia sekolah 13-15 tahun yang sedang bersekolah sekitar 88 persen dan yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (15-18 tahun) hanya sekitar 64-65 persen, berarti ada sekitar 23 persen yang tidak melanjutkan.

APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan perempuan di semua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Sementara apabila kita mencermati perbedaan antar wilayah kabupaten dan kota, wilayah kota cenderung lebih tinggi pencapaiannya apabila dibanding kabupaten, hal ini terjadi disemua jenjang pendidikan. Artinya didalam rangka meningkatkan angka pencapaian APS nasional, wilayah kabupaten perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dikatakan bahwa masing-masing usia sekolah / jenjang pendidikan mempunyai standar

pelayanan minimal untuk bersekolah, seperti tabel berikut:

Tabel 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menurut Usia Sekolah dan Jenjang Pendidikan

Usia Sekolah / Jenjang Pendidikan	Standar Pelayanan Minimal (%)
7 – 12 / SD + MI	95,00
13 – 15 / SLTP+MTs	90,00
16 – 18 / SLTA + MAN + SMK	60,00

Sumber : Mendiknas RI, 2013

Dari standar pelayanan minimal (SPM) ini juga terlihat bahwa rata-rata tingkat partisipasi sekolah di kabupaten/kota secara umum masih berada di bawah standar pelayanan minimal terutama di daerah kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat belum dapat meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, karena partisipasi sekolah merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pemerintah di bidang Pendidikan. Semakin banyak anak usia sekolah yang masih aktif sekolah maka program pemerintah di sektor Pendidikan dapat dikatakan berhasil, namun sebaliknya jika persentase anak usia sekolah yang masih sekolah cenderung menurun maka program pemerintah dapat dinilai gagal.

Masih relatif rendahnya tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Dari banyak faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, maka faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat adalah anggaran sektor pendidikan, pendapatan perkapita dan tingkat pendidikan kepala keluarga. Hal ini konsisten dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2004) menemukan bahwa rasio pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan (alokasi anggaran sektor pendidikan), pendapatan per kapita, dan

tingkat pendidikan orang tua (dapat membaca dan menulis) akan berpengaruh positif dalam meningkatkan tingkat partisipasi sekolah.

Angka partisipasi sekolah akan dipengaruhi oleh alokasi anggaran pada sektor pendidikan, karena permasalahan yang sering dihadapi oleh dunia pendidikan dari dulu hingga era otonomi belum bergeser. Persoalan pendidikan di daerah masih sekitar sarana dan prasarana yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga pengajar yang kurang dengan ketersebaran yang tidak merata. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud. Banyak pihak menilai pelayanan pendidikan di era otonomi daerah tidak menunjukkan perubahan berarti, bahkan cenderung memburuk. Permasalahan ini antara lain disebabkan pengelolaan APBD (alokasi anggaran pendidikan) yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan desentralisasi pendidikan, sehingga menjadi kendala pencapaian berbagai sasaran program yang telah ditetapkan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar.

Dengan demikian sangat diperlukan adanya alokasi anggaran untuk pendidikan yang cukup besar setiap tahunnya agar dapat menunjang dan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Pada era reformasi tuntutan alokasi anggaran pendidikan yang lebih besar menjadi suatu fenomena yang perlu menjadi perhatian pihak perumus anggaran. Berdasarkan data yang penulis dapatkan yaitu dari tahun 2005-2008, anggaran sektor pendidikan

Kabupaten/Kota (rata-rata anggaran sektor pendidikan per penduduk usia sekolah) relatif besar dan hal ini diduga akan mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah di daerah yang bersangkutan.

Pendapatan rumah tangga (orang tua) diduga menjadi salah satu penyebab naik turunnya tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Secara umum pendapatan per kapita di daerah kota lebih tinggi dari daerah kabupaten.

Di samping anggaran sektor pendidikan dan pendapatan, tingkat pendidikan orang tua juga diduga mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Lingkungan keluarga (orang tua) merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Keluarga merupakan proses penentu dalam keberhasilan belajar. Orang tua dikatakan sebagai pendidik pertama, karena orang tua yang pertama mendidik anaknya sejak dilahirkan dan dikatakan sebagai pendidik utama karena pendidikan yang diberikan orang tua merupakan dasar dan sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya. Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa yang akan datang. Keluarga yang akan memberikan wacana kehidupan seorang anak, baik perilaku, budi pekerti, maupun adat kebiasaan sehari-hari. Dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak dalam lingkungan keluarga, maka akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pula, karena tujuan pendidikan yang dilaksanakan di dalam keluarga adalah untuk membina, membimbing, dan mengarahkan anak kepada tujuan yang suci.

Pada diri setiap anak terdapat suatu dorongan dan daya untuk meniru, dengan dorongan ini anak dapat melakukan sesuatu yang telah dilakukan orang tuanya. Masa ini juga merupakan masa sensitif bagi anak, sebab apa yang dilihat dan apa yang didengarnya akan selalu ditiru tanpa

mempertimbangkan baik dan buruknya. Dalam hal ini sangat diharapkan kewaspadaan serta perhatian yang besar dari orang tua, karena masa meniru ini secara tidak langsung turut membentuk watak anak dikemudian hari.

Dari tahun 2005 sampai 2008, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengisyaratkan rata-rata tingkat pendidikan orang tua yang berpendidikan minimal sarjana di Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,85 persen. Hal ini cenderung naik dari tahun 2005 – 2008 yaitu sebesar 4,57 persen tahun 2005, lalu 4,70 persen tahun 2006, naik menjadi 5,11 persen tahun 2007 dan sebesar 5,03 persen di tahun 2008.

Dengan demikian faktor identifikasi dan meniru pada anak-anak amat penting, sehingga mereka menjadi terbina, terdidik, dan belajar dari pengalaman langsung. Hal ini pula yang nantinya akan berpengaruh lebih besar dari pada informasi atau pengajaran lewat instruksi dan petunjuk yang disampaikan dengan kata-kata. Dalam lingkungan keluarga, pendidikan yang berlangsung didalamnya adalah pendidikan informal, dengan orang tua sebagai pendidik. Orang tua adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya, karena secara kodrati ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Allah berupa naluri orang tua. Kasih sayang dan pengertian keluarga khususnya orang tua akan meninggalkan yang positif dalam perkembangan jiwa anak. Untuk itu sudah sepantasnya orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1) Pengaruh anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah. 2) Pengaruh pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah. 3) Pengaruh tingkat pendidikan kepala rumah tangga terhadap angka partisipasi sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi eksplorasi yang dilakukan pada seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk data times series.

Variabel penelitian ini adalah Angka Partisipasi Sekolah (Y), Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan (X1), Pendapatan per kapita (X2) dan Pendidikan Kepala Rumahtangga (X3). Angka partisipasi sekolah adalah angka partisipasi sekolah menengah yang merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah (13-18 tahun) yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Ukuran variabel angka partisipasi sekolah menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{APS 13-18} = \frac{\text{Penduduk 13-18 masih sekolah}}{\text{penduduk usia 13-18 tahun}} \times 100 \%$$

Alokasi anggaran sektor pendidikan maksudnya sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat untuk sektor pendidikan dan ditambah dari dana dekonsentrasi dari pusat serta dari Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2005 – 2008. Setelah diperoleh totalnya kemudian dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-18 tahun) di masing-masing kabupten/kota.

Pendapatan per kapita adalah suatu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Pendapatan disini dapat diartikan nilai balas jasa yang diterima atas penggunaan faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi tersebut di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata masyarakat atau penduduk. Dengan demikian pendapatan perkapita pada satu tahun didapat dengan jalan membagi pendapatan pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

Tingkat pendidikan orang tua adalah pendidikan formal orang tua sebagai kepala keluarga. Tingkat pendidikan orang tua ini di ukur dengan satuan persentase

pendidikan orang tua yang minimal sarjana.

Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis adalah regresi berganda.

Deskripsi Variabel Penelitian

1. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Dari pengolahan yang penulis lakukan terhadap data hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2005-2008, diketahui bahwa secara umum di Kabupaten/Kota angka partisipasi sekolah (APS) menengah belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan, walaupun rasio anggaran pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah di kabupaten/kota sudah berkisar antara Rp. 714 176 sampai Rp. 6 228 072 per penduduk usia sekolah (tahun 2005-2008).

Rata-rata angka partisipasi sekolah (APS) menengah Provinsi Sumatera Barat adalah 77 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia 13-18 tahun yang bersekolah hanya sekitar 77 orang atau ada sekitar 23 anak tidak bersekolah lagi atau tidak pernah sekolah.

Dilihat menurut kabupaten/kota, angka partisipasi sekolah penduduk usia 13-18 tahun pada daerah kabupaten berkisar antara 65 persen sampai 80 persen, sebaliknya daerah kota semuanya diatas 80 persen atau diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Dan kalau dilihat lebih jauh lagi, maka kabupaten pada daerah pemekaran seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sijunjung dan Pasaman jauh dibawah rata-rata Sumatera Barat yaitu masing-masing 65,59 persen, 68,64 persen dan 68,71 persen.

Pada daerah kota, angka partisipasi sekolah sudah relatif baik dibandingkan daerah kabupaten atau rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang dan Payakumbuh merupakan daerah kota yang tertinggi angka partisipasi sekolahnya yaitu masing-masing 88,44 persen dan 88,10 persen.

Dengan demikian secara keseluruhan, untuk penduduk usia 13-18 tahun ada sekitar 23 persen lagi yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, sehingga apa yang diharapkan wajib belajar bisa terwujud.

2. Perkembangan Anggaran Pendidikan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Di era reformasi dan otonomi ini tuntutan alokasi anggaran pendidikan yang lebih besar menjadi suatu fenomena yang perlu menjadi perhatian pihak perumus anggaran atau pemerintah daerah setempat. Berdasarkan data yang penulis dapatkan yaitu dari tahun 2005-2008, anggaran sektor pendidikan Kabupaten/Kota (rasio anggaran sektor pendidikan per penduduk usia sekolah) relatif besar dan hal ini diharapkan akan mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah di daerah yang bersangkutan

Tinggi rendahnya rata-rata anggaran pendidikan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang bersangkutan, alokasi dana dekonsentrasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta jumlah anak usia sekolah di masing-masing kabupaten/kota.

Dari hasil penelitian diketahui terjadinya ketimpangan yang cukup tinggi antara suatu daerah dengan daerah lainnya mengenai jumlah anggaran sektor pendidikan jika ditinjau dari rata-rata anggaran sektor pendidikan per penduduk usia sekolah di Kabupaten/Kota, dimana rasio anggaran yang paling tinggi pada tahun 2005-2008 adalah Kota Sawahlunto, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data ini memperlihatkan bahwa ada apa dengan sektor pendidikan di Provinsi Sumatera Barat, karena pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah kenapa rasio tertinggi anggaran pendidikan terletak di Kota Sawahlunto dan angka terendah terletak

di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di daerah yang bersangkutan perlu perhatian yang serius dari pengambil kebijakan daerah itu.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat (Rp. 2.767.696,-), rata-rata anggaran pendidikan per penduduk usia sekolah pada daerah kabupaten cenderung lebih rendah, sebaliknya daerah kota lebih tinggi dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat partisipasi sekolah pada daerah yang bersangkutan.

3. Perkembangan Pendapatan Perkapita di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Pendapatan rumah tangga (orang tua) akan menjadi salah satu penyebab naik turunnya tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Secara umum pendapatan per kapita di daerah kota lebih tinggi dari daerah kabupaten dan hal ini berbanding lurus dengan angka partisipasi sekolah, dimana angka partisipasi sekolah daerah kota lebih tinggi dari daerah kabupaten.

Dari hasil penelitian diketahui tingkat pendapatan perkapita penduduk di Sumatera Barat, dimana terlihat rata-rata pendapatan perkapita tertinggi ada pada Kota Padang yaitu sebesar 19,86 juta dan yang terendah adalah daerah Pesisir Selatan sebesar 6,68 juta. Data ini merupakan cerminan bahwa masih rendahnya tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang tentunya akan mengurangi kemampuan dari masyarakat dalam pembiayaan pendidikan anaknya sehingga pada akhirnya akan mengurangi tingkat partisipasi sekolah. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita ini sejalan dengan angka partisipasi sekolah daerah yang bersangkutan.

Dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita tahun 2005-2008, daerah kabupaten cenderung lebih rendah dari daerah kota, hal ini sejalan atau berbanding lurus dengan angka partisipasi sekolahnya.

4. Perkembangan Pendidikan Orang Tua di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Pendidikan orang tua juga akan berbanding lurus dengan tingkat partisipasi sekolah anak-anaknya, karena pada diri setiap anak terdapat suatu dorongan dan daya untuk meniru, dengan dorongan ini anak dapat melakukan sesuatu yang telah dilakukan orang tuanya. Masa ini juga merupakan masa sensitif bagi anak, sebab apa yang dilihat dan apa yang didengarnya akan selalu ditiru tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Dalam hal ini sangat diharapkan kewaspadaan serta perhatian yang besar dari orang tua, karena masa meniru ini secara tidak langsung turut membentuk watak anak dikemudian hari.

Rata-rata pendidikan orang tua yang minimal sarjana di Provinsi Sumatera Barat 4,85 persen, artinya dari 100 orang tua di Provinsi Sumatera Barat ada sekitar 4 sampai 5 orang yang sarjana. Dengan rata-rata tingkat pendidikan orang tua minimal sarjana sekitar 0,68 persen di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 10,46 persen di Kota Padang tentunya wawasan orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada kedua daerah ini akan berbeda dan begitu juga di Kabupaten/Kota yang lain. Dan apabila angka ini di dibandingkan dengan angka partisipasi sekolah (APS) menengah pada daerah yang bersangkutan juga akan terlihat berbanding lurus yaitu angka partisipasi sekolah (APS) menengah Kota Padang sudah mencapai 88,44 persen sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sekitar 65,59 persen.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui terlihat bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang minimal sarjana di Sumatera Barat. Data ini memperlihatkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah.

Dengan demikian faktor identifikasi dan meniru pada anak-anak amat besar, sehingga mereka menjadi terbina, terdidik,

dan belajar dari orang tuanya langsung. Dalam lingkungan keluarga, pendidikan yang berlangsung didalamnya adalah pendidikan informal, dengan orang tua sebagai pendidik. Orang tua adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya, karena secara kodrati ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Allah berupa naluri orang tua. Kasih sayang dan pengertian keluarga khususnya orang tua akan meninggalkan yang positif dalam perkembangan jiwa anak. Untuk itu sudah sepantasnya orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak.

Dihat dari rata-rata data persentase pendidikan orang tua yang minimal sarjana (4,85 persen), kasusnya hampir sama dengan data lainnya dimana daerah kabupaten cenderung lebih rendah dari daerah kota. Kabupaten yang relatif jauh dibawah rata-rata Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat yang masing-masingnya kurang dari 2 persen.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, yang diharapkan data terdistribusi normal/merata. Adapun hasil analisis data untuk uji normalitas data penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

No	Variabel	Sig
1	Anggaran Pendidikan (X ₁)	0,560
2	Pendapatan Perkapita (X ₂)	0,079
3	Tingkat Pendidikan Orang Tua (X ₃)	0,849
4	Angka Partisipasi Sekolah (Y)	0,061

Sumber : Hasil Analisis Data, 2013

Dari Tabel 2 diketahui bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) untuk variabel anggaran pendidikan (X₁) sebesar 0,560, variabel pendapatan perkapita (X₂) sebesar 0,079, variabel tingkat pendidikan orang

tua adalah sebesar 0,849 dan variabel angka partisipasi sekolah (Y) adalah sebesar 0,061. Jadi, terlihat bahwa nilai sig. dari semua variabel penelitian nilainya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan pada penelitian ini ($r = 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal, dengan demikian analisis regresi linear berganda dapat dilaksanakan karena data telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sesama variabel independent terjadi korelasi atau hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Adapun hasil analisis data untuk uji multikolinearitas data penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Anggaran Pendidikan	.536	1.865
	Pendapatan Perkapita	.847	1.181
	Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga	.607	1.648

a. Dependent Variable: Angka Partisipasi Sekolah

Berdasarkan hasil olahan data sebagaimana terlihat pada Tabel 3 diketahui bahwa nilai *tolerance* dari *Collinearity Statistics* mendekati 1 (satu) dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) untuk semua variabel bebas di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kasus multikolinearitas antara sesama variabel bebas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian ini tidak mempunyai hubungan yang kuat satu sama lainnya sehingga dapat dilakukan pengolahan data dengan regresi linear berganda karena tidak terdapat kasus multikolinearitas antara sesama variabel bebas.

2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan apabila data yang digunakan adalah data *time series*, gunanya adalah untuk menguji

apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Berdasarkan hasil pengolahan data untuk uji autokorelasi diketahui nilai DW adalah sebesar 1.918, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data penelitian karena nilai DW adalah antara 2 sampai -2.

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil analisis data untuk uji normalitas data penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig
1	Anggaran Pendidikan (X1)	0,106
2	Pendapatan Perkapita (X2)	0,137
3	Tingkat Pendidikan Orang Tua (X3)	0,102

Sumber : Pengolahan data sekunder, 2013

Berdasarkan analisis data untuk uji heteroskedastisitas terlihat bahwa nilai signifikansi dari semua variabel bebas adalah lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan ($r = 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian tidak mengalami kasus heteroskedastisitas sehingga analisis regresi dapat dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, digunakan pendekatan OLS (*Ordinal Least Square*) atau metode kuadrat terkecil yang dibentuk oleh tiga variabel bebas (X_1, X_2, X_3) dan satu variabel terikat (Y). Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda yang

telah penulis lakukan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

No	Variabel	Koefisien	t hitung	Sig.
1	Kontanta	66,115		
2	Anggaran sektor pendidikan (X1)	1,132	2,028	0,046
3	Pendapatan perkapita (X2)	0,759	4,496	0,000
4	Tingkat pendidikan kepala keluarga (X3)	1,530	7,414	0,000

Sumber : Pengolahan data primer, 2013

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel di atas dapat dituliskan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 66,115 + 1,132 X_1 + 0,759 X_2 + 1,530 X_3 + e$$

Nilai koefisien dari masing-masing variabel dapat diartikan sebagai berikut :

5. Nilai konstanta (a) sebesar 66,116 berarti tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas maka nilai variabel terikat nilainya hanyalah sebesar 66,116. Ini berarti bahwa tanpa adanya pengaruh dari anggaran pendidikan, pendapatan perkapita dan tingkat pendidikan orang tua maka nilai angka partisipasi sekolah hanyalah sebesar 66,116.
6. Nilai koefisien regresi dari variabel anggaran pendidikan (X_1) adalah sebesar 1,132. Hal ini berarti dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan dalam setiap satuannya akan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah (Y) sebesar 1,132 dalam setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*). Nilai *probability* sebesar 0,046, jika dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan ($\Gamma = 0,05$), maka terbukti bahwa nilai *probability* lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,046 < 0,05$). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi

sekolah (APS). Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%.

7. Nilai koefisien regresi dari variabel pendapatan perkapita (X_2) adalah sebesar 0,759. Hal ini berarti dengan adanya peningkatan dari pendapatan perkapita dalam setiap satuannya akan dapat meningkatkan nilai angka partisipasi sekolah (Y) sebesar 0,759 dalam setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*). Nilai *probability* sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan ($\Gamma = 0,05$) maka terbukti bahwa nilai *probability* lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah (APS). Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%
8. Nilai koefisien regresi dari variabel tingkat pendidikan orang tua (X_3) adalah sebesar 1,530. Hal ini berarti dengan adanya peningkatan dari tingkat pendidikan orang tua dalam setiap satuannya akan dapat meningkatkan nilai angka partisipasi sekolah (Y) sebesar 1,530 dalam setiap satuannya. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan (*ceteris paribus*). Nilai *probability* sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan ($\Gamma = 0,05$) maka terbukti bahwa nilai *probability* lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi sekolah (APS). Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima pada tingkat kepercayaan 95%
9. Nilai *R-Square*) sebesar 0,547, hal ini berarti besarnya pengaruh dari anggaran sektor pendidikan, pendapatan perkapita, dan tingkat

pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah sebesar 54,70% dan sisanya sebesar 45,30% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian

Pengaruh Anggaran Sektor Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan dari anggaran sektor pendidikan akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan temuan penelitian ini maka diketahui bahwa untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan anggaran untuk sektor pendidikan karena dengan adanya anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan tentunya akan dapat membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan sehingga masyarakat akan mendapatkan pendidikan dengan biaya murah dan bahkan kalau bisa adanya pendidikan yang gratis untuk masyarakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Temuan penelitian ini konsisten dengan pendapat Deding (2006) yang menyatakan kebijakan desentralisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah menuntut tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Hambatan di bidang pendidikan dari dulu hingga era otonomi belum bergeser. Persoalan pendidikan di daerah masih sekitar sarana dan prasarana yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga pengajar

yang kurang dengan ketersebaran yang tidak merata. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud. Banyak pihak menilai pelayanan pendidikan di era otonomi daerah tidak menunjukkan perubahan berarti, bahkan cenderung memburuk. Permasalahan ini antara lain disebabkan pengelolaan APBD (alokasi anggaran pendidikan) yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan desentralisasi pendidikan, sehingga menjadi kendala pencapaian berbagai sasaran program yang telah ditetapkan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar.

Menurut Ghofur (2005), kesehatan dan pendidikan merupakan dua hal utama dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Saat ini, potret pendidikan dan kesehatan Indonesia saat ini sedang terpuruk, kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga disekitar kita. Salah satu penyebabnya adalah belum signifikannya alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan. Alokasi belanja sosial yang lebih baik memang bukan satu-satunya masalah yang menghambat pendidikan dan kesehatan. Namun jika alokasi anggaran lebih signifikan, tentu saja peningkatan partisipasi, akses, penyediaan dan perbaikan sarana-sarana akan memiliki peluang lebih besar dalam memenuhi kewajiban negara pada pendidikan dan kesehatan.

Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan dari pendapatan perkapita akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Dari temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat karena dengan adanya pendapatan perkapita yang tinggi dari masyarakat tentunya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sehingga pada akhirnya angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih tinggi.

Juga dari temuan penelitian ini diketahui bahwa dalam proses pendidikan terhadap anak, pengaruh orang tua cukup dominan karena anak butuh perhatian dan bimbingan dari orang tua dan juga semua kebutuhan finansial pendidikan. Investasi sumberdaya manusia melalui pendidikan haruslah disadari oleh semua pihak, baik Pemerintah, swasta maupun keluarga. Investasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekonomi di masa yang akan datang melalui pengorbanan yang dilakukan pada saat sekarang. Perlu disadari bahwa pendidikan erat kaitannya dengan tingkat penghasilan keluarga, uang pendidikan, fasilitas pendidikan dan faktor lain yang berhubungan dengan pendidikan itu sendiri.

Temuan penelitian ini konsisten dengan pendapat Zakaria (1990) mengatakan tingkat penghasilan orang tua mempunyai kaitan yang erat dengan aktivitas belajar anak baik di sekolah maupun di rumah. Orang tua yang berpenghasilan relatif tinggi biasanya mampu menyediakan berbagai fasilitas belajar yang dibutuhkan anak. Sedangkan orang tua yang berpenghasilan relatif rendah kurang mampu memenuhi kebutuhan belajar anak. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap pendidikan anaknya.

Sementara Salim (1990). mengatakan bahwa pendapatan rendah atau golongan miskin yaitu golongan yang memperoleh pendapatan atau penerima sebagai imbalan terhadap kerja yang jumlahnya jauh lebih

sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan sebagai pegawai negeri golongan I dan II, pembantu rumah tangga, tuna karya dan sebagainya.

Kemudian menurut Ratna (1989) adalah jumlah keseluruhan pendapatan atau kekayaan (termasuk semua barang dan hewan peliharaan). Pendapatan pada prinsipnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu penghasilan tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan menurut Surakhmad (1986:67) pendapatan adalah semua hasil yang diterima oleh semua anggota keluarga melalui berbagai jenis usaha kegiatan ekonomi. tolok ukur yang dipergunakan adalah pendapatan perkapita pertahun dari keluarga tersebut. Pendapatan keluarga dapat dilihat dalam bentuk uang, dapat pula dalam bentuk barang atau berupa fasilitas-fasilitas misalnya : rumah dinas, pengobatan gratis.

Tinggi rendahnya pendapatan keluarga erat kaitannya dengan keberhasilan anak. Keluarga yang mampu dan berpenghasilan cukup, cenderung memberikan fasilitas yang memadai kepada anaknya, dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Sedangkan keluarga yang miskin atau pendapatannya rendah cenderung kurang mampu memenuhi perlengkapan belajar anak mereka (tempat belajar, peralatan belajar, uang sekolah) dan pada gilirannya menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada diri anak dan menyebabkan anak menjadi menurun. (Slameto, 1995).

Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan dari tingkat pendidikan kepala keluarga akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan temuan penelitian ini diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan tingkat pendidikan kepala keluarga karena dengan semakin tingginya tingkat pendidikan kepala keluarga akan menjadi motivasi bagi anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang melebihi dari orang tuanya, juga kepala keluarga yang mempunyai pendidikan tinggi tentunya mempunyai keinginan yang tinggi untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga pada akhirnya angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih tinggi.

Juga dari temuan penelitian ini diketahui bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dari proses pendidikan ini seseorang akan dibentuk sikap dan kepribadiannya dan pada akhirnya setelah dewasa dan berkeluarga nanti akan menerapkan sikap dan kepribadiannya tersebut pada anggota rumah tangganya (anak-anaknya).

Dengan seseorang terdidik atau berpendidikan tinggi, maka mereka akan punya wawasan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang terdidik (pendidikan rendah). Dan pada saat mereka menghadapi persoalan apakah anaknya harus sekolah atau langsung diterjunkan ke dunia kerja, maka mereka akan memilih untuk melanjutkan pendidikan anaknya setinggi mungkin.

Dengan demikian wawasan dan tingkat pendidikan orang tua sangat berpengaruh dalam melahirkan keinginan untuk meningkatkan pendidikan pada anaknya sendiri. Orang tua yang pendidikannya tinggi akan berusaha untuk

meningkatkan taraf pendidikan anak pada taraf yang lebih tinggi.

Temuan pendidikan ini konsisten dengan pendapat Made (2009) mengatakan Pendidikan merupakan indikator utama pembangunan dan kualitas SDM suatu bangsa. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya peningkatan sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu bangsa dalam berbagai bidang, tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumber daya alam yang dimilikinya, melainkan oleh keunggulan kualitas sumber daya manusianya yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang unggul itu. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, diharapkan akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan anggaran sektor pendidikan terhadap angka partisipasi sekolah (APS). Adanya peningkatan anggaran sektor pendidikan akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS). Adanya anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan tentunya akan dapat membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan sehingga masyarakat akan mendapatkan pendidikan dengan biaya murah dan bahkan kalau bisa adanya pendidikan yang gratis untuk masyarakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan perkapita terhadap

- angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan dari pendapatan perkapita akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan tingkat pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat karena dengan adanya pendapatan perkapita yang tinggi dari masyarakat tentunya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sehingga pada akhirnya angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih tinggi
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan dari tingkat pendidikan kepala keluarga akan meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan tingkat pendidikan kepala keluarga karena dengan semakin tingginya tingkat pendidikan kepala keluarga akan menjadi motivasi bagi anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang melebihi dari orang tuanya, juga kepala keluarga yang mempunyai pendidikan tinggi tentunya mempunyai keinginan yang tinggi untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga pada akhirnya angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih tinggi
- Implikasi Kebijakan**
1. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan cara meningkatkan anggaran sektor pendidikan, pendapatan perkapita dan peningkatan pengetahuan orang tua atau kepala keluarga.
 2. Program-program penuntasan wajib belajar dasar 9 tahun serta perintisan wajib belajar pendidikan menengah yang berhubungan dengan pengembangan akses untuk memperoleh pendidikan sebaiknya diprioritaskan bagi daerah kabupaten/kota yang tingkat partisipasi sekolahnya dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat.
 3. Bagi wilayah tertentu dimana angka partisipasi sekolahnya relatif rendah dari kabupaten/kota lainnya, sebaiknya dikembangkan pola belajar pendidikan luar sekolah (Paket B dan C), SMP-SMA satu atap, SMP/SMA Terbuka yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat.
 4. Perlu publikasi dan penyuluhan yang lebih intensif terhadap eksistensi Sekolah menengah Kejuruan agar lulusan SMP atau sederajat dapat memilih sekolah lanjutan sesuai bakat dan minatnya. Hal ini penting guna dapat menciptakan tenaga kerja siap pakai serta guna pencapaian target Renstra dengan perbandingan siswa SMK dengan siswa SMA adalah 60 : 40.
 5. Perlu pendataan dan pemetaan yang lebih komprehensif yang bersifat individual tentang anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan sekolah, sebagai bahan kebijakan pengembangan pendidikan dan pemberian beasiswa agar anak dapat melanjutkan pendidikannya.
 6. Perlu peningkatan alokasi anggaran sektor pendidikan yang mencapai minimal 20 persen diluar belanja pegawai (gaji, honor dan sebagainya)

- dan efektifitas penggunaannya supaya anggaran tersebut tepat sasaran.
7. Perlu sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan terhadap rumah-tangga-rumah-tangga yang pendapatan per kapitanya rendah (miskin) dan tingkat pendidikan orang tuanya yang rendah, bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka
 8. Diharapkan orang tua selalu mengawasi mengarahkan serta membimbing anak dalam belajar. Khususnya membantu mengatasi kesulitan dalam belajar yang dialami oleh anak-anaknya. Orang tua diharapkan memberikan dorongan atau motivasi yang intensif dan berkesinambungan terhadap belajar anaknya. Karena dengan adanya dorongan atau motivasi yang intensif dan berkesinambungan diharapkan secara otomatis akan menambah dan meningkatkan prestasi belajar anak.
 9. Kepada orang tua murid, diharapkan memberikan dan menumbuhkan motivasi/dorongan kepada anak/siswa yang maksimal untuk keberlangsungan proses belajar mengajar, motivasi dan tingkat pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan belajar/prestasi belajar
 10. Bagi para orang tua yang tingkat pendidikannya rendah diharapkan selalu menambah wawasan dan pengetahuannya dengan cara sering mengikuti kegiatan keilmuan baik di lingkungan sekitarnya atau ke tempat lain, adapun cara lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan dengan sering membaca buku-buku yang bersangkutan dengan pendidikan, koran, majalah dan sebagainya agar bias membantu membimbing dan mendorong serta mengarahkan anaknya guna mendapatkan prestasi belajar yang baik.
 11. Kepada pihak sekolah agar senantiasa dapat menciptakan dan mewujudkan lingkungan sekolah yang akrab dan tentram serta nyaman untuk melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga diharapkan prestasi belajar siswa menjadi baik dan optimal, karena lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor keberhasilan belajar siswa/ prestasi belajar siswa.
 12. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk menganalisis kebijakan di sektor pendidikan dalam rangka usaha meningkatkan tingkat partisipasi sekolah serta menjadi masukan dan bahan penelitian yang lebih mendalam bagi masyarakat tentang peningkatan partisipasi sekolah.
 13. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam menganalisis faktor-faktor apa yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda, 2005-2008, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005-2008*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Padang.
- BPS, 2005-2008, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2005-2008*, Badan Pusat Statistik, Jakarta
- BPS, 2005-2008, *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2005-2008*, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Padang
- Deding Ishak Ibnu Sudja, 2006, *Menyoal Kebijakan Anggaran Pendidikan Dasar*, Jakarta
- Ghofur Abdul dan Fahmi Badoh, 2005, *Menabur Anggaran Menunai Masa Depan*, GAPRI – ICW, Jakarta
- Made Dwi Setyadhi Mustika, 2009, *Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita Dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Provinsi Bali. (Sebuah Analisis*

Tipologi Daerah), Fakultas
Ekonomi, Universitas Udayana,
Denpasar.

- Ratna Willis Dahar. 1989. *Teori-teori belajar*. Jakarta : Erlangga.
- Salim. E. (1990). *Pola Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Jangka Panjang ke dua*. Makalah disampaikan pada Kongres ISEI XI, Bandung
- Slameto. (1995). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya* . Jakarta : Rineka Cipta.
- Zakaria, 1990. Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Partisipasi Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Ekonomi Universitas Syiah Kuala*. Banda Aceh.